



Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Agung Suharyanto*

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada Kota Binjai Tahun 2010 Di Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota yang beretnis Tionghoa sebanyak 326 KK. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara random sampling yaitu 10% dari populasi. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari 326 KK etnis Tionghoa yaitu 32 KK yang diambil secara acak sederhana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, kemudian dianalisis dengan tabel frekuensi. Berdasarkan hasil analisa dari observasi, penyebaran angket dan wawancara kemudian diadakan pembahasan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota telah berpartisipasi dalam Pilkada Kota Binjai Tahun 2010. Dengan demikian jelaslah hasil penelitian ini mendukung hipotesis, yang sekaligus berarti hipotesis dapat diterima.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Masyarakat Tionghoa; Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

This study aims to determine how the Chinese Peoples Political Participation and the constraints faced by the Chinese community in Binjai city elections in 2010 in Kampung Tanjung District of Binjai City. The methodology used in this research is descriptive qualitative method is a way or method of describing the state of research in the field or object. Total population in this study were all heads of families Kampung Tanjung Binjai City District of the ethnic Chinese as many as 326 households. The sampling technique is by means of random sampling of 10% of the population. Then the sample in this study is 10% of the 326 households 32 households of ethnic Chinese are drawn randomly. Data collection techniques used were observation, questionnaires, and interviews. The data obtained in the study were analyzed using descriptive analysis method, then analyzed using frequency tables. Based on the analysis of observation, questionnaires and interviews were then held a discussion on the research results obtained the conclusion that the Chinese community in Kampung Tanjung District of Binjai City has participated in the elections of Binjai in 2010. Thus it is clear these results support the hypothesis, which also means that the hypothesis acceptable.

Keywords: Political Participation; Chinese Society; Local Elections

How to Cite: Suharyanto, A, (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 151-160

*Corresponding author:
E-mail: suharyantoagung@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah masyarakat Negara, yang secara Antropologis, terdiri atas lebih dari 500 suku Bangsa (*ethnic group*) dengan ciri-ciri bahasa dan kultur tersendiri. Bahkan lebih unik lagi, setiap suku Bangsa di Indonesia dapat dikatakan mempunyai satu daerah asal, satu pengalaman sejarah, dan satu nenek moyang tersendiri. Orang Tionghoa yang pada awalnya datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang yang dikenal dengan panggilan orang Tiongkok oleh penduduk Nusantara merupakan bagian dari cerita sejarah masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda kehidupan orang-orang Tionghoa ini juga masih terlihat sebagai pedagang bahkan sampai pada saat sekarang ini serta mereka umumnya berdomisili di pusat-pusat keramaian atau di kota-kota besar.

Memasuki masa reformasi kedudukan orang-orang Tionghoa ini dipertanyakan kedudukannya. Mereka ini sebagai warga yang menumpang tinggal di Indonesia atau dikatakan sebagai warga Indonesia. Pemerintah menjawabnya dengan alasan yang kuat disertai dasar hukum yang jelas yaitu, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia statusnya resmi sebagai warga negara Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 26 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara". Adalah suatu fakta sejarah yang tak terbantah, bahwa warga etnis Tionghoa adalah pendatang terlepas dari kenyataan tentang kedatangannya terjadi berabad-abad yang lampau, sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru. Fakta sejarah ini tak bisa dihapus dan harus diterima sebagai bagian integral kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Hak untuk hidup di tempat tinggalnya sekarang secara legal sudah dilindungi Undang-Undang, terutama karena warga Tionghoa telah memilih menjadi warga Negara Indonesia (WNI), lengkap dengan

segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Jadi secara sosiologis, posisi warga etnis Tionghoa telah berubah dari pendatang menjadi penduduk dan warga Negara. Selain itu, Pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dasar ini semakin mempertegas tentang kedudukan Etnis Tionghoa bahwa mereka telah menjadi warga Negara Indonesia bukan hanya sebagai status, tetapi juga ikut aktif secara sah dan legal dalam unsur-unsur Pemerintahan.

Sebagaimana dikatakan Asshiddiqie (dalam Groeneveldt, 2009: 24) "Orang-orang China peranakan yang tinggal menetap turun temurun di Indonesia, sejak masa reformasi sekarang ini, telah berhasil memperjuangkan agar tidak lagi disebut sebagai orang China, melainkan disebut sebagai orang Tionghoa". Di samping itu, karena alasan Hak Asasi Manusia dan sikap non-diskriminasi, sejak masa pemerintahan B.J Habibie melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan China dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etnisitas saja, seperti etnis Jawa, Sunda, Batak, Arab, Manado, China, dan lain sebagainya. Karena itu, status hukum dan status sosiologis golongan keturunan Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia sudah tidak perlu lagi dipersoalkan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia sangat menjaga keharmonisan kultur-kultur yang ada didalamnya, sehingga secara responibilitas pada masa orde baru yang dikenal istilah Pribumi dan non pribumi langsung diubah

keberadaannya setelah memasuki era reformasi dengan istilah WNI dan WNA untuk mencegah diskriminasi antara sesama warga Indonesia. Namun, masalah dari diskriminasi ini dapat terlihat dari peran mereka untuk ikut dalam kegiatan pemerintahan atau unsur-unsur politik.

Kenyataan menunjukkan bahwa penulis melihat di Kota Binjai ada suatu daerah yang bernama Kampung Tanjung secara Mayoritas daerah ini di domisili oleh orang-orang Tionghoa yang jauh kehidupannya dari hal-hal politik maupun pendidikan politik dalam Konteks Nasionalisme. Mereka lebih tertarik untuk berkecimpung dalam bidang ekonomi/pengusaha dan kegiatan yang mengarah perjudian.

PEMBAHASAN

Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu dalam situasi dan kondisi suatu kelompok, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan dalam suatu kelompok, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Menurut Kamarulzaman (2005: 529) Partisipasi berasal dari kata "*Participation*" (bahasa Inggris), yang artinya ikut berperan dan "*Partisipatie*" (Bahasa Belanda) artinya mengambil bagian dalam suatu kegiatan, sedangkan menurut Poerwadarminta (2001: 493) "Partisipasi adalah ikut berperan serta dalam kegiatan". Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut.

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai

politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan)

Istilah partisipasi politik diterapkan pada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik seperti halnya seorang pemilih atau pemberi suara berpartisipasi dengan memberikan suaranya, seorang Menteri Luar Negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan Luar Negeri. Istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik karena warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik. Ramlan Surbakti (2002:129) memberi contoh bahwa: "partisipasi politik, antara lain kegiatan mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam Pemilu dan Pilkada".

Weyner (dalam Rahman 2002: 158) menyatakan bahwa: Partisipasi Politik merupakan tindakan suka rela yang berhasil ataupun gagal, yang akan terorganisir maupun tidak, kadang-kadang atau terus menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak sah untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintah pada tingkat nasional, daerah atau lokal.

Menurut Budiardjo (2004: 119) menyatakan "partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*)"

Di samping itu partisipasi masyarakat tidak harus dilihat seberapa aktif keikutsertaannya dalam mekanisme pemasaran politik (marketing) serta yang bersifat kampanye-kampanye, melainkan juga yang lebih bermanfaat adalah

bagaimana masyarakat Tionghoa dapat terlibat secara aktif dalam gerakan sosialisasi Pilkada, menjadi sukarelawan pemantau Pilkada atau bersikap kritis terhadap bentuk-bentuk kecurangan dalam Pilkada.

Milbrath (dalam Harrison, 2007: 40) menyatakan: Bentuk- bentuk partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa kategori yakni: pertama, Apatist adalah orang yang menarik diri dari proses Politik. Kedua, spectator adalah orang yang secara aktif terlibat dalam pemilihan umum. Ketiga, Gladiator adalah orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak muka, aktivitas partai dan pekerja kampanye, serta aktifitas masyarakat. Keempat, pengkritik adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Berdasarkan pemikiran di atas betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan setiap peserta Pilkada dan sudah merupakan suatu keharusan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dan bukan sebaliknya untuk menarik diri dari setiap kegiatan politik, khususnya dalam pelaksanaan kampanye, karena keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini akan lebih menghasilkan kehidupan politik yang benar-benar demokratis hidup dan memiliki nilai sportifitas yang harmonis dan memiliki nilai-nilai tanggung jawab terhadap segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Gaffer (dalam Rahman, 2002: 41) menerangkan peran serta atau partisipasi politik warga masyarakat ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1) Electoral activity. yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan Pemilu/pilkada. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberi sumbangan untuk kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai politik atas nama partai itu, memberikan suara dalam

pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.

2) Lobbying, Yaitu tindakan seseorang, ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk mobilisasi dukungan atau dan tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat.

3) Organizational, Yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Ada organisasi yang memusatkan perhatiannya terhadap isu-isu yang sifatnya spesifik, seperti misalnya wahana lingkungan hidup Indonesia (WLHI), dan ada pula yang mempunyai kepentingan berbagai macam isu, seperti misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mempunyai kepedulian terhadap masalah hukum, HAM dan demokrasi. Ada organisasi yang memusatkan perhatiannya pada masalah keagamaan. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen dari partisipasi sekalipun seseorang belum tentu terlibat langsung mempengaruhi.

4) Contacting, Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga Negara dengan secara langsung (mendatangi ketempatnya bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan secara individual ataupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. Biasanya dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut.

5) Violence, Yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan pengerusakan terhadap barang atau individu.

Menurut Weiner (dalam Harrison, 2007: 130) terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut: Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik; Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik; Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang; Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat; Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik

Milbrath (dalam Masy'ari, 1993: 56) menyebutkan ada 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu: Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal; Karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-

orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial politiiik dan ekonomi serta yang lainnya biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik; Faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial tersebut menyangkut status ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik; Faktor situasi dan lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang lebih demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diiisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Iver (dalam Soekanta 2005: 26) menyatakan bahwa: "Yang dikatakan dengan masyarakat adalah sistem dari kebiasaan tata cara dan wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan golongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia".

Dari pengertian di atas dalam masyarakat itu terdapat *in group* pada anggota, interaksi merupakan titik tolak adanya masyarakat, jadi masyarakat belum ada pertalian antara anggota-anggota harus ada kontak antara satu dengan lainnya. Tiap orang sadar akan adanya orang lain disekitarnya dan dalam setiap tindakan mau tidak mau mengindahkan orang lain.

Linton (1996: 56) menyatakan, "setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama

sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir dengan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia cenderung hidup berkelompok di suatu wilayah tertentu yang selalu mereka sesuaikan dengan pola hidup mereka. Masyarakat Tionghoa selalu hidup dan berdomisili di daerah keramaian yaitu daerah perkotaan. Pernyataan ini dianggap tepat, karena disesuaikan dengan pola hidup mereka sehari-hari. Kehidupan masyarakat Tionghoa yang selalu cenderung aktif dan menggantungkan hidupnya di bidang ekonomi adalah suatu alasan yang tepat dan mendasar. Ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka dulu pada saat masuk ke Indonesia. Selain dalam berekonomi, alasan yang sangat signifikan mereka berdomisili di perkotaan adalah kota identik dengan gaya hidup, hiburan-hiburan serta dunia malam. Selain itu, kegiatan perjudian menjadi suatu kebiasaan hidup yang selalu mereka jalani dalam kehidupan sehari-harinya

Minimnya etnis Tionghoa dalam kancah Politik di Indonesia merupakan suatu fenomena yang tak bisa lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang heterogen, dengan berbagai budaya, adat, suku, dan bahasa. Jika melihat oknum-oknum yang terlibat dari proses politik, heterogenitas ini sangat terlihat jelas. Ada orang Jawa, Batak, Padang, Bugis, Melayu, Aceh, dan lain sebagainya. Sangat tepat rasanya, “*the founding father*” Mencetuskan istilah “*Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada dasarnya warga Tionghoa menganggap terjadi suatu kesenjangan sosial serta diskriminasi-ras yang timbul dari latar belakang kependudukan mereka di Indonesia.

Menurut Wibowo (2009: 214) mengatakan “Banyaknya tindak-tindak kekerasan yang pernah terjadi terhadap etnis Tionghoa. Jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998, etnis Tionghoa menjadi korban

dari penjarahan dari aksi massa, pembakaran rumah dan tempat usahanya, pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan, yang pasti mengakibatkan penderitaan dan trauma yang berlangsung lama”. Ini menjadi bukti nyata mengapa mereka selalu tertutup dalam kehidupan Nasionalisme.

Era Reformasi adalah suatu arti kemerdekaan bagi etnis Tionghoa, Presiden B.J Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparat pemerintah telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan China dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Memasuki kepemimpinan K.H Abdurahman Wahid, etnis Tionghoa telah secara bebas untuk mengadakan kegiatan kebudayaan mereka seperti Imlek, tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.

Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai Juni 2005 sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi.” Istilah ini bisa diartikan positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Infrastruktur dalam hal ini yaitu rakyat terlibat dalam kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, dan partai politik. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan sehari-hari, mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya suatu kebijakan pemerintahan.

Dalam pengertian negatif, Pilkada langsung sebagai “lompatan demokrasi”

mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses Pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” di mana rakyat berhak berbuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat tersebut. Eforia ini juga sering direspons khalayak sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan materi dalam Pilkada.

Dalam hal ini Kristiadi (dalam Amirudin, 2006: 1) mengatakan: “Sebagai proses dari transformasi politik, makna Pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, legitimit, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat”.

Bagi masyarakat umum, Pilkada langsung sering juga ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi. Amirudin (2006: 13) menyatakan “dengan sejumlah calon kepala daerah, diketahui bahwa masing-masing kandidat rata-rata menyediakan anggaran pencalonan sampai Rp. 8 miliar. Calon yang masih menjabat (*incumbent*) umumnya menyediakan anggaran yang lebih besar dari jumlah rata-rata tersebut”. Anggaran itu biasanya untuk pos-pos pengeluaran utama berupa pemeliharaan jaringan pendukung dari tim sukses sampai ketinggian koordinator lapangan di desa-desa, biaya untuk kampanye, biaya lobi dan promosi, biaya untuk konsumsi, dan lain-lain. Dengan rata-rata anggaran kandidat yang cukup besar, wajar apabila rakyat berharap dapat ikut merasakan cipratan uang itu. Sebaliknya, para kandidat pun sadar sepenuhnya bahwa dalam pemilihan

langsung diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk “membujuk” para pemilih agar menentukan pilihannya kepada mereka.

Itulah fenomena *money politics* dalam Pilkada. Alasannya adalah kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur-unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, praktik politik uang semacam itu biasanya sulit untuk ditindak atau dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap tangan. Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacaknya, apalagi jika mempertimbangkan suatu klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Bisri (dalam Amirudin, 2006: 4) menyatakan, “Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai jalan pintas untuk menoleransi politik uang di tengah berlakunya hukum ekonomi Pilkada, yaitu adanya *supply and demand* antara pihak kandidat dan pemilih”.

Partisipasi adalah ikut berperan sertanya dalam suatu kegiatan. Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut.

Masyarakat Tionghoa menyatakan sudah pernah mendapatkan proses sosialisasi pendidikan politik. Sebagian masyarakat Tionghoa mendapatkan pendidikan politik pada saat mengikuti kegiatan sekolah, dari mata pelajaran PKN serta Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Sebagian masyarakat lagi menyatakan pendidikan politik pernah didapat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan dan keagamaan seperti di Vihara yang sering mendapatkan suatu penyuluhan baik dari Kelurahan maupun para calon Walikota yang melakukan silaturahmi.

Masyarakat Tionghoa telah berpartisipasi aktif dalam Pilkada Kota Binjai dengan secara langsung memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tingkat kehadiran yang baik. Selain itu ada faktor yang membuat masyarakat Tionghoa mempunyai sikap partisipasi yang aktif yaitu rasa simpatik masyarakat Tionghoa terhadap salah satu calon atau salah satu pasangan walikota yang mereka harapkan dapat memimpin.

Keikutsertaan sebagian masyarakat Tionghoa menjadi bagian dalam tim sukses membentuk suatu dinamika politik dalam pemerintahan. Dinamika tersebut dapat dilihat dari heterogenitas kultur masyarakat Indonesia yang menyatu dalam politik. Dalam tim sukses masyarakat Tionghoa ikut dan turut bermusyawarah secara mufakat dengan adanya menyumbang ide yang diusulkan kepada calon walikota berupa pendidikan gratis dan pengobatan gratis atau murah dengan melihat gambaran yang ada bahwa biaya pendidikan dan pengobatan sekarang ini semakin dan serba mahal, serta dengan membuat KTP gratis. Ide ini akan menjadikan suatu pertimbangan bagi calon walikota pada saat menjadi Walikota dalam menentukan dan membuat suatu kebijakan dengan proses *out put* dan *in put*.

Masyarakat Tionghoa mengatakan kampanye itu berhubungan dengan masyarakat beramai-ramai berkumpul di suatu tempat bagaikan adanya suatu pesta, bersorak-sorak di jalanan, konvoi kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang selanjutnya dipublikasikan di masyarakat umum untuk mencari simpatik masyarakat serta dukungan massa dari berbagai unsur-unsur masyarakat maupun pemerintahan.

Lingkungan politik menggannggu ketentraman hidup merupakan suatu gambaran yang didapat masyarakat Tionghoa dengan melihat gambaran yang negatif dari sisi politik. Masyarakat Tionghoa menyatakan kondisi pemerintahan pada saat jatuhnya orde

baru di tahun 1998 adalah gambaran buruknya lingkungan politik. Politik bersifat brutal dan anarkis yang menjadi gambaran masyarakat Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa lebih memilih bidang ekonomi daripada bidang politik. Orang Tionghoa mempunyai latar belakang kehidupannya datang ke Indonesia sebagai pedagang. Tradisi itu masih mereka pegang teguh secara turun temurun. Aktif di ekonomi, menggapai usaha-usaha dan bisnis menjadi pilihan masyarakat Tionghoa. Orang Tionghoa juga mengatakan di bidang perekonomian lebih menjanjikan visi dan misi yang lebih jelas dengan ungkapan kalimat bukan karya kata tetapi karya nyata. Kalimat ini merupakan slogan dari seorang pemimpin di Kota Binjai.

Orang Tionghoa memang memiliki hubungan komunikasi yang kurang erat dengan orang-orang pribumi. Kehidupan orang Tionghoa sangat jarang sekali menyatu dengan orang pribumi. Di lingkungan umum orang Tionghoa yang berada pada satu kawasan atau satu tempat yang sama dengan orang pribumi, orang Tionghoa menyebut istilah orang pribumi dengan nama *hwanna*.

Masyarakat Tionghoa menilai sosialisasi politik hanya ada pada saat *event-event* politik tertentu saja seperti pada saat menjelang Pilkada, Pilgub, dan Pemilu. Masyarakat Tionghoa juga menilai calon Walikota yang datang dan bersilahturahmi hanya pada saat masa Kampanye yaitu pada saat calon walikota mencari simpatik masyarakat agar mendapat dukungan dari masyarakat. Tetapi setelah calon walikota tersebut terpilih dan menang maka Walikota akan lupa dengan daerah yang pernah dikunjungi.

Masyarakat Tionghoa menganggap politik uang yang terjadi adalah suatu bentuk pesta demokrasi rakyat. Masyarakat juga mengemukakan pendapatnya memilih calon yang memberikannya sejumlah uang. Fenomena seperti ini sudah menjadi tradisi yang

melekat kepada masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Kendala-kendala yang bersifat intern dan ekstern telah terjadi. Kendala-kendala tersebut seperti: Masalah teknis dalam kinerja-kinerja di TPS. Problem-problem kecil selalu terjadi karena diawali adanya kekeliruan kecil; Kontradiksi antara PPS dengan saksi-saksi mengenai pencoblosan surat suara; Sebagian masyarakat berebut jatah karena ingin terlibat dalam kegiatan di TPS, PPS, dan Linmas karena adanya honor di balik kegiatan tersebut sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa terkucil; diwarnai situasi yang tegang dari masing-masing calon Walikota pada saat detik-detik Pilkada berlangsung; Masing-masing Calon menggunakan jasa dari OKP untuk melindungi asset atau bagian yang dianggap penting dari milik pribadi masing-masing calon; Akibat memakai jasa dari OKP, kedua belah pihak OKP terlibat bentrok di Kota Binjai, tetapi akhirnya dapat diatasi oleh aparat keamanan.

Orang Tionghoa juga selalu aktif dalam organisasi keagamaan yang mereka bentuk. yaitu Vihara, seperti *barongshai* yang aktif diikuti pemuda-pemuda setempat. *Barongshai* merupakan ajang kreasi diri dan pemberdayaan diri yang menarik minat masyarakat umum. Pemuda-pemuda Tionghoa juga mendapatkan pengajaran-pengajaran stimulasi, afektif, dan kognitif di dalamnya dari guru-guru vihara. Organisasi ini juga mempunyai anggaran dan AD/ART dan kepengurusannya tercatat.

Pendidikan politik memang harus lebih ditekankan kepada generasi muda masyarakat Tionghoa sekarang ini. Generasi muda Tionghoa saat ini telah menjauh dari rasa nasionalisnya, tidak seperti orang-orang tuanya dahulu. Pendidikan di sekolah harus lebih mengajarkan rasa cinta tanah air dan memahami kondisi politik pemerintahan. Pendidikan sekarang ini mulai melupakan cinta tanah air dan lebih mementingkan siswanya pintar dan terampil di pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Cara

seperti ini harus diseimbangkan dengan pendidikan yang mengajarkan cinta tanah air sehingga dapat mewujudkan masyarakat Tionghoa yang nasionalis atau cinta tanah air terhadap Bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Partisipasi Politik merupakan tindakan suka rela yang berhasil ataupun gagal, yang akan terorganisir maupun tidak, kadang-kadang atau terus menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak sah untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintah pada tingkat nasional, daerah atau lokal. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa merupakan suatu bagian dari proses demokratisasi masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Asas demokrasi dalam politik khususnya dalam Pemilu yang dikenal dengan asas *luber* yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, dan demokratis telah diterapkan oleh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kampung Tanjung dalam pelaksanaan Pilkada Kota Binjai Tahun 2010 walaupun tidak seutuhnya. Cacat-cacat politik dalam metode pelaksanaannya pasti selalu muncul dipermukaan. Pro dan Kontra selalu ada di panggung politik tetapi itu semua dikembalikan kepada pandangan masyarakat khususnya masyarakat Tionghoa dalam menyikapi kondisi pemerintahan dan perpolitikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa masyarakat Tionghoa di Kelurahan

Kampung memiliki partisipasi yang aktif dalam Pilkada Kota Binjai Tahun 2010 baik diputaran pertama maupun diputaran kedua. Masyarakat Tionghoa dengan secara langsung memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tingkat kehadiran yang baik. Selain itu ada faktor yang membuat masyarakat Tionghoa mempunyai sikap partisipasi yang aktif yaitu rasa simpatik masyarakat Tionghoa terhadap salah satu calon atau salah satu pasangan walikota yang mereka harapkan dapat memimpin Kota Binjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M. 1999, Penelitian Kependidikan Prosedure dan Strategi. Bandung: Angkasa.
- Amirudin. 2006, Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halking. 2008. Sistem Politik Indonesia. Medan: FIS Unimed
- Harrison, L. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana
- Groeneveldt, W.P. 2009. Nusantara Dalam Catatan Tionghoa. Depok: Komunitas Bambu
- Kadir, A., (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 65-75.
- Kamarulzaman, AKA. 2005. Kamus Ilmiah Serapan. Yogyakarta. Absolut.
- Kansil, C.S.T, 1986. Aku Pemuda Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka..
- Koentjaraningrat. 2004. Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia, Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.
- Listyarti, R. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X. Jakarta: Esis.
- Masy'ari, A. 1993. Problematika Pemuda. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nasution. S. 2007. Metode Research. Bandung: Bumi Aksara.
- Nawawi, H. 1997. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers.
- Pedoman Penelitian Skripsi Unimed, 2008. Unimed Medan.
- Poerwadarminta. 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, A. 2002. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC
- Soekanto, S. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudjana, 1992. Metodologi Statistik, Bandung, Tarsito.